

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. KAJIAN PUSTAKA

Dalam setiap tahapan penelitian, kajian pustaka memiliki fungsi tertentu yaitu membantu alat penelitian serta dipilih konsep-konsep teoritik yang tepat. Kajian pustaka dalam penelitian digunakan untuk melakukan analisis terhadap objek yang diteliti. Sehingga kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Penelitian terdahulu antara lain :

Asdar Abidin (2008), dalam penelitian Analisis Kekalahan Calon Partai Golkar Dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penyebab faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan partai Golkar antara lain sebagai berikut, *pertama*, masalah petahana. Persoalan ini dikarenakan pelaksanaan Pilkada di daerah dimenangkan oleh kandidat petahana, Karena kedudukan petahana dianggap masih memiliki kekuatan dan matang dalam merencanakan strategi politik, termasuk mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mesin politiknya. Kemudian faktor berikutnya adalah dibentuknya koalisi koalisi partai, padahal koalisi menentukan hasil perolehan suara dan jaringan

pemenangan oleh partai Golkar serta diberlakukannya UUD Pilkada Langsung. Oleh karena itu, kedua faktor itu menjadi salah satu kelemahan di tingkat partai Golkar.

Bayu Nugroho Aji (2011), dalam penelitian yang berjudul Strategi Partai Golkar Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2010 Di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis faktor internal dan faktor eksternal diperoleh analisis internal dengan kekuatan kepengurusan yang lengkap, Satu komando kepengurusan); kelemahan (Sumber dana yang terbatas, kurang berkualitas dan loyalitasnya Kader Partai Golkar, Organisasi sayap yang kurang optimal, Waktu Persiapan yang relatif singkat); analisis eksternal dengan peluang (Perpecahan kader partai lain, Kepala Daerah merupakan kader partai, Koalisi dengan partai lain, Tim sukses berasal dari berbagai elemen masyarakat.);

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifia Yunastiti (2015), dengan judul penelitian Analisis Kekalahan Pasangan Soemarmo-Zuber Dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kekalahan pasangan Soemarmo-Zuber dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015 adalah Mesin partai pengusung Soemarmo-Zuber tidak efektif karena adanya ketidakcocokan antara PKS dan PKB dari segi pandangan beragama dan ideologi. Sistem rekrutmen politik juga tidak berjalan dengan baik karena mengusung calon yang berasal dari luar partai. Sehingga, risikonya adalah belum ada kecocokan antara calon yang diusung dengan mesin partai politik. Kemudian, koalisi PKS dan

PKB merupakan koalisi kecil yang bertarung di Kandang Banteng PDIP.

Arief Zaafri Razaqtar (2013), penelitian berjudul Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono dan Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan peran partai politik dalam menentukan kader terbaiknya untuk menduduki posisi pengambil kebijakan (*policy maker*) adalah hal yang wajib dilakukan guna memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Partai berkewajiban untuk mencetak kader terbaiknya yang akan menduduki jabatan elit pengambil kebijakan. Kader yang militan, akan mempunyai daya tarik untuk bergabungnya koalisi partai lain. Hal ini yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah.

Hasil penelitian terkait dengan faktor faktor yang mempengaruhi kekalahan yang dilakukan oleh Muhammad Rendy Dorona (2013), yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekalahan Pasangan Herman Abdullah Dan Agus Widayat Dalam Pemilihan Gubernur Riau Putaran I Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal partai kurangnya kerjasama tim sukses pasangan HA dalam menggalang masyarakat Tapung, hal ini disebabkan tim sukses kurang melakukan sosialisasi, komunikasi sehingga kurang dikenal masyarakat di Kecamatan Tapung Hulu, sehingga visi dan misi pasangan HA tidak tersampaikan dengan baik.

Tabel 2.1.

Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Asdar Abidin (2008)	Analisis Kekalahan Calon Partai Golkar Dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Periode 2008-2013.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor yang mengakibatkan kekalahan partai Golkar menurut informan sebagai berikut, <i>pertama</i> , masalah incumbent. Hampir semua pelaksanaan Pilkada di daerah dimenangkan oleh pasangan incumbent, karena kedudukan incumbent dianggap masih kuat dan matang dalam merencanakan komunikasi politik, termasuk mempengaruhi PNS sebagai salah satu mesin politiknya. Kemudian faktor berikutnya adalah tidak adanya koalisi yang dibangun oleh partai Golkar serta diberlakukannya UUD Pilkada Langsung. Kedua faktor tersebut menjadi kelemahan di tingkat partai Golkar. Sehingga ketika media cetak menayangkan ke masyarakat baik melalui polling dan lembaga informasi lainnya, masyarakat cenderung menerima dan mempercayai informasi tersebut.
2.	Bayu Nugroho Aji (2011)	Strategi Partai Golkar Dalam Menghadapi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis faktor internal dan eksternal diperoleh analisis

		Pemilukada Tahun 2010 Di Kabupaten Boyolali.	internal dengan kekuatan (Partai Reformis, Komunikasi, Calon yang berkualitas, Kepengurusan yang lengkap, Satu komando kepengurusan); kelemahan (Sumber dana yang terbatas, kurang berkualitas dan loyalitasnya Kader Partai Golkar, Organisasi sayap yang kurang optimal, Waktu Persiapan yang relatif singkat); analisis eksternal dengan peluang (Perpecahan kader partai lain, Kepala Daerah merupakan kader partai, Koalisi dengan partai lain, Tim sukses berasal dari berbagai elemen masyarakat.); Ancaman (Incumben yang masih menjabat, Persiapan rival yang cukup lama, Pragmatisme kader partai) .
3.	Hanifia Yunastiti ^[1] _{SEP} (2015)	Analisis Kekalahan Pasangan Soemarmo-Zuber Dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang menyebabkan kekalahan pasangan Soemarmo-Zuber dalam Pilkada Kota Semarang Tahun 2015 adalah Mesin partai pengusung Soemarmo-Zuber tidak efektif karena adanya ketidakcocokkan antara PKS dan PKB dari segi pandangan beragama dan ideologi. Sistem rekrutmen politik juga tidak berjalan dengan baik karena mengusung calon yang berasal

			dari luar partai. Sehingga, risikonya adalah belum ada kecocokan antara calon yang diusung dengan mesin partai politik. Kemudian, koalisi PKS dan PKB merupakan koalisi kecil yang bertarung di Kandang Banteng PDIP.
4.	Arief Zaafril Razaqtiar (2013)	Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono dan Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai politik dalam menentukan kader terbaiknya untuk menduduki posisi pengambil kebijakan (<i>policy maker</i>) adalah hal yang wajib dilakukan guna memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Partai berkewajiban untuk mencetak kader terbaiknya yang akan menduduki jabatan elit pengambil kebijakan. Kader yang militan, akan mempunyai daya tarik untuk bergabungnya koalisi partai lain. Hal ini yang harus dilakukan oleh partai politik dalam menghadapi pemilihan kepala daerah. Kader-kader terbaik ini kemudian akan memberikan dampak positif, seperti misal akan meyakinkan bergabungnya koalisi partai lain yang mempercayakan dukungannya dan juga menambah keyakinan anggota partai lain dalam mendukung

			pemenangan calon pasangan tersebut.
5.	Muhammad Rendy Dorona (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekalahan Pasangan Herman Abdullah Dan Agus Widayat Dalam Pemilihan Gubernur Riau Putaran I Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor internal kurangnya kerjasama tim sukses pasangan HA dalam menggalang masyarakat Tapung, hal ini disebabkan tim sukses kurang melakukan pendekatan sebelumnya dengan masyarakat dan tim sukses yang kurang dikenal masyarakat dikecamatan Tapung Hulu, sehingga visi dan misi pasangan HA tidak tersampaikan dengan baik.

Sumber : Diolah oleh penulis.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka diyakini benar bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas. Meskipun dalam penelitian ini akan meneliti dan mengkaji tentang faktor faktor kekalahan pasangan calon dalam pilkada, tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asdar Abidin dan Muhammad Rendy Dorona.

Posisi penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan pada analisis rekrutmen politik dan institusionalisasi partai Golkar dalam pemilihan Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Penelitian ini berupaya menjelaskan menjelaskan bahwa ketokohan Hidayat Arsani dan popularitas partai Golkar di Bangka

Belitung serta koalisi yang dibangun dengan beberapa partai besar seperti PAN, PKS, dan HANURA tidak menjadi tolak ukur dalam memenangkan kontestasi politik. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat institusionalisasi partai politik dalam kontestasi politik, lebih spesifik penulis ingin mengkombinasikan dengan proses demokrasi internal partai di internal partai Golkar. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengandung unsur kebaruan dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

2.2 Kerangka Teori

Teori merupakan suatu landasan dalam membahas permasalahan yang akan diteliti agar tidak melenceng dari topik yang akan diteliti. Teori juga merupakan salah satu dari unsur penelitian yang sangat penting untuk menerangkan fenomena sosial yang akan diteliti. Kerlinger mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut. (Zamroni, 1992:2). Untuk menjelaskan permasalahan diatas maka peneliti menggunakan beberapa teori yaitu:

2.2.1. Demokrasi Internal Partai

Partai politik (parpol) sangat esensial bagi demokratisasi masyarakat dan demokratisasi partai secara internal merupakan keharusan bagi pelaksanaan demokrasi

dalam sistem politik. Partai politik dewasa ini merupakan unsur penting dalam masyarakat modern. Namun demikian, agar dapat memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat, partai politik demokratis pula secara internal. Sejumlah alasan dapat diajukan untuk menunjukkan betapa partai politik secara internal harus dikelola secara demokratis. (Sumber, *center for research and policy making* (2012:7))

Partai politik di berbagai negara demokrasi secara sadar melakukan sukarela dengan berbagai langkah pembaruan penting untuk meningkatkan demokrasi internal dalam pengelolaan partai politik. Tidak saja dengan menjamin proses pembuatan keputusan yang terbuka, akan tetapi langkah itu juga dilakukan dalam proses seleksi kandidat dan kepemimpinan yang terbuka kepada anggota biasa. (Katz dan Mair, 2002). Partai politik harus menjamin agar para kader partai pada semua tingkatan organisasi aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partai. Para pemimpin jangan diberi kewenangan mutlak untuk mengelola partai secara sentralistik.

Selain itu, partai politik diharapkan melaksanakan berbagai fungsi penting, seperti mobilisasi warga negara dalam proses politik, agregasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, merumuskan dan memperjuangkan kebijakan publik, melaksanakan perekrutan kepemimpinan politik, dan koordinasi parlemen dan pemerintahan ataupun mengingat peran sentral partai dalam demokrasi perwakilan; kebijakan yang didesain untuk memperkuat kapasitas internal organisasi mestinya menjadi prioritas utama. Organisasi besar seperti partai politik itu harus menjamin agar

para kader partai pada semua tingkatan organisasi dan para anggota tetap aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partai. Para pemimpin jangan diberi kewenangan absolut untuk mengelola partai secara sentralistik. Sepanjang tersedia saluran komunikasi terbuka antara para pemimpin dan pengurus dengan para kader dan anggota serta proses pembuatan keputusan dilakukan secara kolektif oleh para pemimpin, pengurus dan kader partai lainnya; kepemimpinan oligarkis akan sukar terbentuk. Hazan dan Rahat (2010:10) mengidentifikasi empat dimensi yang membedakan metode seleksi kandidat di berbagai negara, yaitu ketentuan yang mengatur persyaratan calon; siapa yang menyeleksi kandidat; derajat sentralisasi dalam proses seleksi calon; dan metode seleksi kandidat, antara penunjukan ataukah pemungutan suara. Keempat dimensi ini dapat digunakan untuk membandingkan berbagai negara dalam bidang seleksi kandidat.

Derajat partisipasi pemilih dalam seleksi kandidat dapat dipilah menjadi beberapa tingkat dalam spektrum inklusif dan eksklusif, yaitu pemilihan pendahuluan terbuka (*open primaries*), pemilihan pendahuluan tertutup (*closed primaries*), kaukus lokal, dan konvensi partai. Yang berhak memberikan suara pada pemilihan pendahuluan terbuka bukan saja anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon, tetapi juga pemilih terdaftar lainnya, baik berstatus anggota partai lain maupun yang independen. Sedangkan yang memberikan suara pada pemilihan pendahuluan tertutup hanya anggota partai politik yang mengadakan pemilihan calon tersebut. Yang memberikan suara pada kaukus hanyalah anggota partai politik yang mengadakan

pemilihan calon, tetapi didahului diskusi dan perdebatan, baik antar anggota maupun antara calon dengan anggota mengenai kebijakan yang akan diperjuangkan sang bakal calon. demokratisasi partai secara internal mencakup:

1. Hak anggota partai (partisipasi);
2. Keterwakilan berbagai unsur dalam partai (representasi dan inklusif);
3. Pemilihan pengurus partai tingkat pusat (pemilihan);
4. Pelembagaan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai;
5. Demokratisasi sumber keuangan partai;
6. Transparansi dan akuntabilitas partai;
7. Hubungan partai dengan fraksi partai di lembaga legislatif;
8. Otonomi pengurus partai tingkat lokal;
9. Kewenangan pengurus cabang pada pemilu lokal; dan
10. Peran partai tingkat pusat dalam pemilu nasional.

Proses demokrasi internal partai adalah proses pemilihan seorang calon pimpinan Partai melalui penyerapan aspirasi seluruh kader-kader di tingkat akar rumput/*grassroots* sehingga Ketua Umum yang terpilih merupakan aspirasi kader-kadernya. Dengan demikian proses demokrasi internal partai adalah suatu cara untuk mendapatkan seorang pimpinan partai dengan menerapkan mekanisme pengambilan suara dukungan dari setiap kader di dalam partai sehingga pimpinan partai yang terpilih

mendapatkan legitimasi yang kuat untuk menjalankan fungsi sebagai seorang pimpinan tertinggi di dalam partainya.(Ware, 1996:258).

Sedangkan dimensi penerapan prinsip dan prosedur demokrasi dalam pengelolaan partai secara internal dapat dioperasionalkan menjadi sejumlah indikator:

1. Siapa yang berwenang memilih dan mengganti pengurus partai
2. Menghormati dan mengakomodasi perbedaan dalam partai
3. Kemungkinan menyatakan kritik secara terbuka terhadap kebijakan partai
4. Kemungkinan anggota fraksi partai mengambil keputusan yang berbeda dari garis partai, tetapi keputusan itu berdasarkan tuntutan konstituen
5. Keterwakilan berbagai unsur partai (daerah, kelompok marjinal, dan kelompok minoritas), baik dalam kepengurusan partai maupun pencalonan jabatan publik
6. Pengelolaan partai menurut kehendak elite partai atau berdasarkan AD/ART partai
7. Demokratisasi sumber keuangan partai politik sehingga partai tidak tergantung kepada satu pihak dalam sumber keuangan
8. Keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan partai dan penerimaan dan pengeluaran keuangan partai.

Namun sebuah proses demokrasi internal tidak benar-benar menjamin bahwa proses yang berlangsung benar-benar demokratis. Kemenangan seorang Ketua Umum sangat ditentukan oleh kekuatan yang dimilikinya seperti latar belakang profesinya

seperti militer, pengusaha, atau birokrat, memiliki dukungan massa, kemampuan finansial, kemampuan persuasif dan lain sebagainya. Masing- masing kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para calon Ketua umum untuk dapat memenangkan suara para kadernya. Namun seringkali para kader mengutamakan pragmatisme politik seperti tawaran uang, jabatan, dan insentif lainnya dengan menghilangkan pertimbangan penting seperti masa pengabdian seorang calon Ketua Umum di dalam partai, loyalitas, pertimbangan moral dan lain sebagainya.

Pada pihak lain demokratisasi partai secara internal akan memajukan budaya demokrasi yang sangat diperlukan, baik di dalam partai maupun dalam masyarakat. Partai politik yang menggunakan prosedur yang secara internal demokratis cenderung memilih pemimpin yang cakap dan dikehendaki oleh publik, mengadopsi kebijakan yang lebih responsif, dan sebagai akibatnya partai akan cenderung mendapatkan dukungan besar dalam pemilihan umum. Selain itu, prosedur internal partai yang demokratis memiliki pengaruh positif pada representasi aspirasi pemilih dan memperkuat organisasi partai karena menarik minat anggota baru dan menciptakan ruang bagi gagasan baru.

Susan Scarrow (2005) mengemukakan agar demokratisasi partai secara internal dipandang sebagai obyek transisi masyarakat ke demokrasi. Karena itu, demokratisasi partai secara internal bukanlah tujuan, melainkan sarana yang akan memiliki dampak positif pada negara dan perkembangan demokrasi dalam masyarakat.

Namun demokratisasi partai secara internal memiliki sejumlah risiko. Terlalu banyak demokratisasi partai secara internal akan berakibat *“overly dilute the power of a party’s inner leadership and make it di cult for that party to keeps its electoral promise”*.

Prosedur seleksi kandidat yang terlalu terbuka atau terlalu cepat dibuka akan menciptakan konflik antar fraksi dalam partai sehingga pada gilirannya akan membuat partai menjadi organisasi yang tidak efektif sekaligus juga akan memperlemah kapasitas partai dalam pemilihan umum. Metode seleksi kandidat yang terbuka dalam beberapa kasus justru meningkatkan kekuasaan sekelompok kecil elite. (Paul Pennings dan Reuven Y. Hazan: 267)

Teori demokrasi internal mengenai syarat ideal bagi seorang pimpinan partai politik dapat menjadi landasan analisis dengan melihat pada saat Hidayat Arsani terpilih sebagai Ketua Umum Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2013-2018) mengingat Hidayat Arsani adalah Ketua Umum pertama yang tidak pernah menjabat sebagai legislator. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Allan Ware. (Allan Ware, 1996) berpendapat bahwa :

“Hal yang paling utama yang harus dimiliki di dalam rekrutmen politik menyangkut pimpinan partai pada saat sekarang yaitu harus telah memiliki pengalaman yang lama sebagai seorang legislator, bekerja sebagai legislator partainya yang berada di parlemen menjadi jalan untuk tangga karir bagi seseorang untuk bisa naik menjadi seorang pimpinan partai.

Sehingga yang menjadi prasyarat penting untuk menjadi seorang Ketua Umum atau pimpinan sebuah partai adalah haruslah memiliki pengalaman dan pengabdian yang lama sebagai wakil partai di dalam parlemen. Dengan menjadi legislator di dalam parlemen merupakan tangga bagi seseorang untuk bisa menjadi pimpinan partai politik tersebut. Dapat dipahami bahwa yang ditekankan untuk seseorang dapat menjadi pimpinan partai haruslah dilihat dari lamanya seseorang menjalankan fungsi sebagai legislator partainya di dalam parlemen.

2.2.2. Rekrutmen Politik.

Studi mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut.

Rekrutmen politik memiliki keseragaman yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik. Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang

dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, almamater atau faktor status.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Menurut Morgenstern dan Siavelis, analisis terhadap rekrutmen politik terdiri atas dua variabel, yaitu variabel hukum dan variabel partai. Sedangkan Norris membagi analisis rekrutmen politik dalam empat level analisis yaitu 1) analisis pada level sistem politik yang terdiri dari sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian; 2) proses rekrutmen yang menganalisis demokrasi internal partai; 3) analisis terhadap para kandidat; dan 4) level analisis pada selektor.

Menurut Afan Gaffar (1999 : 155), Rekrutmen Politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan

perlindungan masyarakat. Lebih jauh, Gabriel Almond (Lily Romli, 2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

Dalam konteks regulasi di Indonesia, telah diatur sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses dimana partai politik memilih dan mengangkat tokoh-tokoh politik yang kemudian mengenalkan mereka pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik dan berpartisipasi dalam proses politik. tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi pengurus partai dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat, namun tidak melupakan bahwa elit-elit yang berkecimpung didalamnya harus memiliki

kualitas dan serta melalui proses yang disarankan pada latar belakang yang jelas.

2.2.2.1. Mekanisme Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan vital dalam sistem politik suatu Negara. Setiap sistem politik menggunakan pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Menurut teori Almond dan Powell (1996) prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang
2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93) :

1. Partisan

Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai

2. Compartmentalization

Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang

3. Immediate Survival

Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.

4. Civil Service Reform

Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Dengan demikian, dikatakan bahwa sistem politik terdapat aturan teknis untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, tetapi walaupun sesuai dengan aturan teknis yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Suatu kecendrungan bahwa orang-orang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik

maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

2.2.2.2. Tahap Tahap Dalam Rekrutmen.

Menurut Syamsuddin Haris (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup :

- a. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
- b. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
- c. Penetapan calon berikut nomer urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Perlakuan parta politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian parta politik. hal tersebut melhairkan

pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. biasanya cara partai melakukan tahapan- tahapana dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya.

2.2.3. Institusionalisasi Partai Politik

Partai politik pada hakikatnya adalah sebuah suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk memaksimalkan fungsinya sebagai bangunan yang mendukung pemerintahan yang demokratis, sebuah partai haruslah terlembagakan. Pelembagaan partai politik yang dimaksud adalah, merupakan proses pematapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbeentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Teguh (2012).

Menurut Huntington (1968:12), institusionalisasi partai politik merupakan sebuah proses pengorganisasian dan prosedural untuk mendapatkan value (nilai) dan stability (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik.

Samuel P. Huntington, dalam bukunya “*Political Order In Changing Societies*” memaknai pelembagaan (lembaga politik) sebagai proses dengan mana organisasi

dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil. Tingkat pelebagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduan. Selain itu, pelebagaan dapat dilihat melalui hal berikut ; *pertama*, penyesuaian diri, *kedua*, kekakuan, *ketiga*, kompleksitas, *keempat* kesederhanaan, *kelima*, otonomi-subordinasi, dan *keenam*, persatuan-perpecahan. Gagasan utama tentang konteks pelebagaan partai politik dalam sistem politik untuk menyumbang terciptanya political order yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis adalah seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Analisis Pelebagaan Partai Politik

Gagasan Utama	Samuel P.Huntington
Konteks Pelebagaan Partai Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertib politik. 2. Sistem politik. 3. Stabilitas politik. 4. Partisipasi politik.
Pelebagaan Partai Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai baku. 2. Stabil.
Parameter Pelebagaan Partai Politik	Kemampuan partai politik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan diri (usia organisasi, usia generasi, fungsi). 2. Kompleksitas. 3. Otonomi. 4. Keterpaduan organisasi dan tata cara.

Implikasi parameter pelebagaan partai politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan (tidak sebatas melaksanakan fungsi partai). 2. Diferensiasi sub-unit organisasi (hirarki-fungsional). 3. Tidak tergantung dari organisasi politik dan metode perilaku yang lain. 4. Keutuhan organisasi.
Efek implikasi parameter pelebagaan partai politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan partai dalam mengelola organisasi internal (stabilitas internal, demokrasi internal, konsensus). 2. Hubungan antar-partai . 3. Peran dalam sistem politik.

Sumber : Huntington, *Political Order in Changing Societies*

Sedangkan menurut Randall dan Svasand (2002) dalam tulisannya mengenai institusionalisasi partai politik dan sistem kepartaian mengemukakan pelebagaan partai politik adalah, proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya.

Terdapat dua aspek dalam proses institusionalisasi sebuah partai politik, yaitu internal-eksternal dan struktural-kultural. Jika masing-masing aspek tersebut digabungkan, maka menghasilkan beberapa variable yang dapat digunakan untuk mengukur derajat institusionalasi sebuah partai politik. Pertama, persilangan antara aspek struktural-internal menghasilkan derajat kesisteman (systemness);

kedua, persilangan antara aspek kultural-internal menghasilkan derajat identitas nilai (value infusion); ketiga, derajat otonomi dalam mengambil keputusan (decisional authonomy) sebagai hasil dari persilangan antara aspek eksternal dan struktural; keempat, derajat pengetahuan publik atau citra opini publik terhadap sebuah partai politik (reification) merupakan hasil persilangan dari aspek ekstenal dengan kultural.

Tabel 2.2.3

Variabel Pelembagaan Politik

	Internal	External
Structural	Systemness	Decisional Autonomy
Attitudinal	Value Infusion	Reification

Sumber: Randall dan Svasand (2002)

Sedangkan menurut Basedau dan Stroh (2008) ada empat dimensi pelembagaan partai, jika di uraikan adalah sebagai berikut: Pertama, *Roots in society* (mengakar dalam masyarakat), maksudnya adalah partai ini memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Kedua, *autonomy* (independen dalam mengambil keputusan), maksudnya adalah kebebasan partai politik dari pengaruh luar partai dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan partai. Ketiga, *level of organization* (alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan), maksudnya adalah kepengurusan ditingkat atas hingga kepengurusan di tingkat bawahnya bekerja untuk kepentingan partai guna membesarkan partai dan memberikan kemenangan dalam pemilu. Keempat,

coherence (kekompakan para anggota partai), maksudnya adalah kekompakan anggota partai dalam parlemen, sehingga tidak terjadi pembelotan dari anggota partai dan tetap berpegang teguh pada kebijakan partai yang telah diambil.

Tabel 2.2.4.

Pelebagaan Partai Politik

	Stability	Value Infusion
External	Roots in society	Autonomy
Internal	Level of organization	Coherence

Sumber : Basedau dan Stroh (2008)

Menurut Basedau dan Stroh (2008:12), dari empat dimensi pelebagaan partai politik, terdapat indikator untuk mengukur pelebagaan partai politik, sehingga dalam penelitian ini teori institusionalisasi partai yang digunakan peneliti adalah teori institusionalisasi menurut Basedau dan Stroh. Partai Golkar Bangka Belitung telah beberapa kali mengikuti pemilu, serta perolehan suara kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pileg 2014 cukup stabil, hal ini juga demikian terjadi di Pileg 2009, Partai Golkar meraih 7 Kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengalami pergantian ketua sebanyak 4 kali sejak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi dinamika yang sangat menarik di internal partai. Fenomena serta kondisi partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung tersebut tentunya akan sangat relevan jika di analisis melalui indikator pelembagaan partai politik menurut Basedau dan Stroh, hal itulah yang menjadi alasan peneliti mengapa penelitian ini menggunakan teori menurut Basedau dan Stroh.

2.2.4. Oligarki Politik

Sejarah oligarki identik dengan dua hal, pertama oligarki menandakan superioritas orang berpunya, kedua oligarki identik dengan bagaimana sepaik terjang mereka di dunia politik dalam kedudukannya sebagai elit. Dalam perkembangannya, teorisasi soal oligarki dalam kacamata ekonomi politik perlahan-lahan mulai bias dan bercampur aduk dengan teori elit. (Winters, 2011:40).

Hal yang membedakan elit dan oligark berasal dari stimulus sumber daya kekuasaan yang mereka miliki. Sumber daya kekuasaan sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Winters, memiliki relevansi kuat pada corak aktor yang menggunakannya. Sumber daya kekuasaan ini terbagi ke dalam lima jenis. Pertama adalah hak politik formal, kedua, jabatan resmi, ketiga adalah kekuasaan koersi (pemaksaan), keempat adalah kekuasaan mobilisasi, dan terakhir adalah basis kekuatan material. Empat sumber daya kekuasaan yang disebutkan di awal merupakan kolaborasi yang membentuk kekuatan elit. Sedangkan sumber yang terakhir merupakan basis terpenting eksistensi oligark.

Winters menambahkan oligarki merupakan sebuah usaha di mana orang-orang kaya mengupayakan agar hak milik mereka tetap lestari dan terlindungi dari pihak-pihak luar yang mencoba menggonggonya, dan klaim harta mereka tetap sama besarnya atau jika bisa, dapat bertambah dan meningkat.

Oligark memiliki kekayaan di atas rata-rata bahkan di atas kekayaan rata-rata kekayaan orang kaya sekalipun, atau bisa disebut individu sebagai super kaya. Masuknya para oligark dalam ranah politik didasarkan pada kegagalan negara dalam menjaga kekayaan mereka, dari berbagai macam ancaman, bahkan ketika ancaman tersebut datang dari negara.

Dalam konteks demokrasi, keterlibatan oligark dalam politik praktis melalui Pemilu juga menarik untuk ditelaah meskipun oligarki dengan demokrasi sangat berbeda. Di mana oligark meletakkan konsentrasi kekuasaan pada kekayaan (klaim terhadap kepemilikan dan kekayaan), sedangkan demokrasi meletakkan konsentrasi pada persebaran kekuasaan non-material (hak, prosedur, dan tingkat partisipasi). Winters (2011) menjelaskan tentang sumber daya kekuasaan yang menurutnya ada lima bentuk kekuasaan individu yang penting, yaitu :

1. Kekuasaan berdasarkan hak politik formal;
2. Jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi;

3. Kekuasaan pemaksaan/*koersif*;
4. Kekuasaan mobilisasi;
5. Kekuasaan material.

Berdasarkan sumber daya tersebut, dapat dijelaskan bahwa para oligark memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan berbagai aspek sumber daya yang dinilai dapat memberikan keuntungan kepada diri dan kelompoknya. Dalam konteks pemilu, apabila elit politik memiliki kelima sumber kekuasaan tersebut, maka ia dapat berbuat apapun untuk mencapai tujuan politiknya. Lebih jauh, dari pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa munculnya calon tunggal pada pemilu Kabupaten Landak dan beberapa daerah lainnya dikarenakan terdapat oligarki di tubuh partai politik karena para elit memiliki 5 (lima) sumber kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Winters. Tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi mereka juga memiliki sumber daya yang maksimal untuk memobilisasi massa guna memperoleh dukungan politik.

Winters (2011) dalam studinya, membagi oligarki dalam beberapa tipe, antara lain:

1. Oligarki panglima (*Warring Oligarchy*)
2. Oligarki penguasa kolektif (*Ruling oligarchy*)
3. Oligarki Sultanistik (*Sultanistik Oligarchy*)
4. Oligarki Sipil (*civil oligarchy*)

Berdasarkan 4 (empat) type oligarki yang dikemukakan oleh Winters, dapat dielaborasi bahwa dalam konteks kehidupan politik di Indonesia, dapat dikatakan bahwa dengan sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia menganut jenis oligarki sipil, yang dipertegas pada konstitusi dan menjadi ciri sistem pemerintahan Indonesia bahwa Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum. Kendati demikian, jika melihat fakta di lapangan, menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia cenderung menggunakan Oligarki penguasa kolektif.

Teori oligarki dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kekuatan finansial yang menjadi salah satu kekuatan Hidayat Arsani untuk dapat mendapatkan rekomendasi dari partai politik sebagai kendaraan untuk maju dalam pesta demokrasi pada tahun 2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kekuatan uang menjadi pengaruh terkuat dalam mendapatkan rekomendasi tersebut.

2.2.5. Elit Politik.

Memahami jati diri bangsa Indonesia bukan sekedar warisan yang ditemukan atau datang dengan sendirinya. Jati diri tersebut sesungguhnya sebuah konstruksi emosional, intelektual, dan ideologis yang diciptakan, dibangun dan diperjuangkan oleh Elit Politik. Elit politik adalah orang-orang terbaik atau pilihan di satu kelompok atau kelompok kecil orang-orang terpendang atau petinggi politik, yang duduk dalam tatanan Struktur Politik dalam hal ini anggota legislatif (DPR/DPRD) dan atau Partai Politik (Parpol), atau pemerintah baik pusat maupun daerah. (Pramono, 2005:3).

2.2.5.1. Konstruksi Teori Elit

Kata elit dapat diartikan dalam berbagai konteks yang berarti terbaik, istimewa, paling mulia atau hal yang terbaik dari sesamanya. Pareto menjelaskan bahwa elit secara sederhana dapat diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan istimewa atau lebih dalam kegiatan tertentu seperti pengetahuan politik atau bisnis besar. Pareto juga membagi istilah elit kedalam dua hal. Pertama, *a governing elite* yaitu sekumpulan pemimpin yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam mengatur masyarakat. Kedua, *a non-governing elite* yaitu sebagai penguat atau pengkritik dari kelompok elit itu sendiri. Dalam pengetahuan sosial kontemporer, kata elit mengacu pada kelompok-kelompok yang memiliki status tinggi dalam masyarakat karena alasan apapun. Patrick dan Brendan. (1987).

Sirkulasi elite menurut Pareto terbentuk dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok yang mengorbankan diri sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elite dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Asumsi teori elit mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori : 1) Sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk

memerintah, dan mereka disebut : (a.) Elite yang berkuasa dan (b.) Elite yang tidak berkuasa. 2). Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. (Varma 1975).

Pareto dan Mosca dalam (Varma:1975) mendefinisikan elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli basis kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, tidak bisa di bantahkan selalu saja ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri.

Pareto dan Mosca juga menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi esensial dalam politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan absolut yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah. .

Sedangkan Baswedan (2006) memetakan elite politik Indonesia berdasarkan kurun waktu tertentu. Berikut digambarkan dalam tabel.

Tabel 2.2.5.

Formasi dan Sirkulasi *Rulling Elite* Indonesia Versi Anies Baswedan

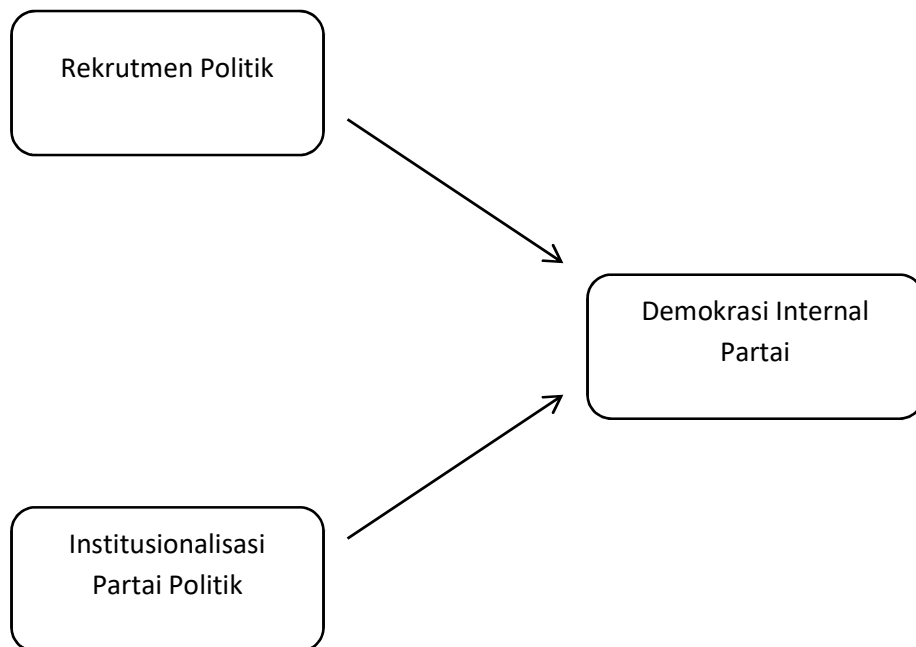
FASE PEMBENTUKAN ELITE		FASE MATURITAS ELITE	
Periode	Tren/ Jalur Rekrutmen	Periode Maturitas	Rulling Elite
1990-an – 1930-an	Pendidikan Modern	1940-an – 1960-an	Intelektual
1940-an – 1960-an	Perjuangan Fisik	1970-an – 1990-an	Angkatan Bersenjata
1960-an – 1990-an	Organisasi Massa/ Politik	2000-an – 2020-an	Aktivis
1990-an – Sekarang	Pasar/Dunia Bisnis	2020-an – ?	Entrepreneur / Bisnisman

Sumber: Tabel ini dikembangkan oleh Alfan Alfian berdasarkan opini “Siapakah Rulling Elite Indonesia” karya Anies Baswedan, Kompas, 31 Oktober 2006.

Pembentukan *ruling elite* Indonesia versi Baswedan (2006) ditentukan atas dasar dua hal, perekrutan anak-anak muda dan tren utama bangsa. Tren utama bangsa ini berubah dari satu masa ke masa berikutnya seiring dengan perjalanan sejarah. Anak-anak muda yang pada masa mudanya terlibat dalam tren utama yang mewarnai bangsa ini kelak akan menjadi aktor-aktor di dalam *ruling elite*. Di sinilah kerangka Path Dependence (*historical institutionalism*) jadi relevan dan powerful.

2.3. Kerangka Pikir Teoritik.

Tabel 2.3.1
Kerangka Pikir



2.4. Definisi Konseptual.

Definisi konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Elit adalah orang-orang terbaik atau pilihan di satu kelompok atau kelompok kecil orang-orang terpandang atau petinggi politik, yang

duduk dalam tatanan Struktur Politik dalam hal ini anggota legislatif (DPR/DPRD) dan atau Partai Politik (Parpol), atau pemerintah baik pusat maupun daerah.

2. Rekrutmen Politik adalah suatu proses dimana terjadi penseleksian calon-calon masyarakat yang dipilih untuk menempati kursi-kursi penting didalam peranan politik, termasuk dalam jabatan birokrasi dan jabatan administrasi.
3. Institusionalisasi Partai Politik, institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value (nilai) dan stability (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik.
4. Oligarki Politik adalah menurut Winters oligarki merupakan sebuah usaha di mana orang-orang kaya mengupayakan agar hak milik mereka tetap lestari dan terlindungi dari pihak-pihak luar yang mencoba mengganggunya, dan klaim harta mereka tetap sama besarnya atau jika bisa, dapat bertambah dan meningkat.

2.5. Definisi Operasional

Analisis Demokrasi Internal Partai dilihat dari :

1. Rekrutmen Politik.

A. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.

- a) Melibatkan seluruh anggota partai (DPW dan DPC).
- b) Melibatkan masyarakat.
- c) Partisipasi LSM dan Ormas.
- d) Inklusif
- e) Eksklusif

B. Seleksi dan penetapan calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.

- a) Melibatkan seluruh anggota partai (DPW dan DPC).
- b) Melibatkan masyarakat.
- c) Partisipasi LSM dan Ormas.
- d) Inklusif

e) Eksklusif

C. Keterbukaan dalam proses rekrutmen. Tahapan ini meliputi korelasi antar pengurus partai di tingkat pusat dan daerah.

a). Eksklusif

b). Inklusif

c) Transparansi Proses Rekrutmen

D. Partisipasi masyarakat dalam rekrutmen. Tahapan ini meliputi proses interaksi antara elit, pengurus partai dan masyarakat.

a) Melibatkan masyarakat.

b) Partisipasi LSM dan Ormas.

c) Inklusif

d) Eksklusif

2. Institusionalisasi Partai Politik.

A. Aspek *roots in society* (Mengakar dalam masyarakat).

a) Kiprah Partai Dalam Politik Lokal

b) Kiprah Partai Di Masyarakat

c) Kestabilan dukungan pemilu (Presentase perolehan suara dalam pemilu terakhir dibanding pemilu sebelumnya).

B. Aspek *autonomy* (Independen dalam mengambil keputusan).

- a) Otonomi pengambilan keputusan (Ketergantungan partai pada figur personal, logistik dalam pengambilan keputusan).
- b) Peran “Politik Dagang Sapi” dalam Partai
- C. Aspek *level of organization* (Terdapat alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan).
 - a) Kekuatan Organisasi
 - b) Sumber Keuangan Partai
 - c) Rekrutmen Keanggotaan dan Kaderisasi di Partai Golkar
- D. Aspek *coherence* (Kekompakan para anggota partai).
 - a) Soliditas kemenangan partai
 - b) Kekompakan partai (Jumlah fraksi dalam partai dan kekompakan).